

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

RIMA WAHYU RAHMAWATI

165310908

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rima Wahyu Rahmawati
NPM : 165310908
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Rokan Hilir

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si. Ak., CA.

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761)
674674 Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : RIMA WAHYU RAHMAWATI
NPM : 165310908
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL PENELITIAN : Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Disetujui Oleh:

Tim Penguji

1. Erfan Effendi, SE., Ak. M.Tech

2. Efi Susanti, SE., M.Acc

Tanda Tangan

()

()

Pembimbing,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si.Ak., CA

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi S1**



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Rima Wahyu Rahmawati
2. NPM : 165310908
3. Hari/ Tanggal : Rabu 16 Juni 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Sidang dibuka oleh **Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc : 1. Cover : - Perbaiki sesuai pedoman 2. Abstrak : - Tidak pakai judul dan tambahkan kata kunci 3. Bab IV : - Pembahasan Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo diperbaiki - Pembahasan sistematis dari dasar, proses hingga laporan 4. Bab V : - Kesimpulan dijelaskan dulu secara keseluruhan penerapan akuntansinya	Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki	Terlihat di hal Cover Terlihat di hal vi Terlihat di hal 39 – 55 Terlihat di hal 56 Terlihat di hal 60	

2	<p>Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech.:</p> <p>1. Abstrak : - Jadikan tiga paragraph</p> <p>2. Bab II : - Rapikan susunan sub judulnya</p> <p>3. Daftar Pustaka : - Pisahkan bunyi peraturan - Terdapat judul buku yang tidak masuk ke dalam teori</p>	<p>Sudah Diperbaiki</p> <p>Sudah Diperbaiki</p> <p>Sudah Diperbaiki</p> <p>Sudah Diperbaiki</p>	<p>Terlihat di hal vi</p> <p>Terlihat di hal 16</p> <p>Terlihat di hal 64</p> <p>Terlihat di hal 63</p>	
----------	--	---	---	---

Mengetahui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
 Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
 Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rima Wahyu Rahmawati
NPM : 165310908
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis
JURUSAN : Akuntansi S1
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
SPONSOR : Dr. Firdaus AR, SE., M.Si. Ak., CA.

Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
	Sponsor		Sponsor
12/03/2020	X	LBM - Perbaiki LBM	<i>plaus m.</i>
20/03/2020	X	LBM - Perbaiki Sesuai Catatan	<i>plaus m.</i>
05/07/2020	X	- Perbaiki Tata Cara Penulisan Sesuai Pedoman Skripsi	<i>plaus m.</i>
08/07/2020	X	- ACC Seminar Proposal	<i>plaus m.</i>
12/03/2021	X	Abstrak - Jadikan 1 spasi dan dibuat dalam Bahasa Inggrisnya	<i>plaus m.</i>

12/03/2021	X	BAB IV - Tambahkan kebijakan akuntansi - Tambahkan penjelasan apakah telah sesuai dengan PABU atau belum - Tambahkan Peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian	<i>J. davis m.</i>
12/03/2021	X	BAB IV - Rapikan lagi susunan dan cara penulisannya	<i>J. davis m.</i>
12/03/2021	X	BAB V - Sesuaikan kesimpulan dengan saran	<i>J. davis m.</i>
30/03/2021	X	BAB V - Tambahkan saran untuk penelitian selanjutnya	<i>J. davis m.</i>
30/03/2021	X	ACC Seminar Hasil	<i>J. davis m.</i>

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 587/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 11 Juni 2021, Maka pada Hari Rabu 16 Juni 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

1. Nama : Rima Wahyu Rahmawati
2. NPM : 165310908
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir.
5. Tanggal ujian : 16 Juni 2021
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B+) 74,5**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

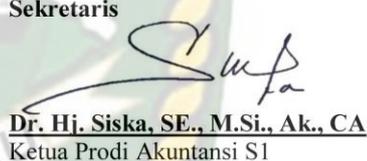
PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

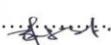
Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
2. Efi Susanti, SE., M.Acc
3. Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech

(..........)
(..........)
(..........)

Notulen

1. Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc

(..........)

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Mengetahui
Dekan,




Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 587 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Rima Wahyu Rahmawati
 N P M : 165310908
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Materi	Ketua
2	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Erfan Effendi, SE., Ak., MM	Assisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada Media Pekanbaru.

tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2021
 Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Rima Wahyu Rahmawati
NPM : 165310908
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir.
Hari/Tanggal : Rabu 16 Juni 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc		
2	Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech		

Hasil Seminar : *)

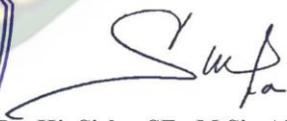
1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **74**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 16 Juni 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rima Wahyu Rahmawati
NPM : 165310908
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir.
Pembimbing : 1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 23 Juli 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

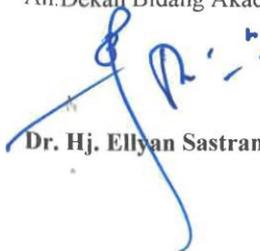
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. _____
2.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Anggota	2. _____
3.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA	Anggota	3. _____

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 23 Juli 2020
Sekretaris,


Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 227/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 29 Februari 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, IV/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Rima Wahyu Rahmawati
 N P M : 165310908
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 03 Maret 2020
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : RIMA WAHYU RAHMAWATI
NPM : 165310908
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska
Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memikirkan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Yang Memberikan Pernyataan



RIMA WAHYU RAHMAWATI

165310908

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada bagian keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung dan mendokumentasikan data keuangan yang diperlukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Metode analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara praktik dengan teori yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan yang disajikan dalam skripsi.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir belum menghitung nilai penyusutan asset tetap Gedung dan bangunan, tidak menghitung nilai akhir persediaan serta tidak membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi, Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Public Housing and Residential Area of Rokan Hilir Regency to be precise in the financial section. This study aims to determine whether the application of accounting at the Public Housing and Residential Area on Rokan Hilir Regency is in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles.

The types of data in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used in this study is to use the direct interview method and document the financial data required at the Public Housing and Residential Area of Rokan Hilir Regency. The data analysis method used is descriptive method, which is to compare the practice with the theory that is related to the research, then a conclusion can be drawn which is presented in the thesis.

From the results of this study, it was found that the Public Housing and Residential Area of Rokan Hilir Regency had not calculated the depreciation value of fixed assets for buildings, did not calculate the ending value of inventory and did not make cash flow reports and reports on changes in budget balances. So it can be concluded that the application of accounting at the Public Housing and Residential Area of Rokan Hilir Regency is not in accordance with generally accepted accounting principles.

Keyword : Financial Report, Application of accounting, Generally Accepted Accounting Principles.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu salawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan S1 diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian oral comprehensive untuk memperoleh sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih ditemui kekurangan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA.,** selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

3. **Ibu Dr Siska, SE., M.Si., Ak., CA.**, selaku Ketua jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA.** selaku Dosen pembimbing dan penasehat Akademik yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan, arahan, saran-saran dan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar dan karyawan karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan sehingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada orang tuaku ayah **Alm. Abdul Rahman** dan ibu **Rinawati** yang selalu mendoakan saya dan juga seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memberikan support kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
7. Untuk adik-adik saya yang tercinta yang telah mendoakan dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Nuzulul Syavira Rahmasari dan Aulia Suci Rahmayanti. Untuk abang-abang dan kakak-kakak sepupu tersayang Faizal, Harry, Budi, kak Fitri dan Kak Ovi yang selalu mengingatkan dan memberi semangat.
8. Untuk paman saya **H. Azhar, SE., M.Si, Alm. Zulkifli, Toni Gunawan** dan bibi saya **Normalina**, yang telah banyak membantu ketika saya dalam kesulitan.

9. Untuk sahabat-sahabatku yang telah menemani dan mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yaitu Mitha Kartika S.AB, Monalisa SE, Tika Sri Ramadani, Putri Jelita SE.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, untuk itu apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan, maka penulis mohon maaf kepada pembaca. Untuk itu penulis selalu terbuka dalam menerima kritikan dan saran yang membangun.

Akhirnya, kepada ALLAH SWT penulis bermohon semoga semua pengorbanan dan keikhlasan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Penulis

RIMA WAHYU RAHMAWATI
NPM : 165310908

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	11
2.1. Telaah Pustaka.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	11
2.1.3 Sistem Pencatatan.....	12
2.1.4 Siklus Akuntansi.....	14
2.1.5 Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	15
2.1.6 SAP Berbasis Akrua.....	18
2.1.7 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Bebasis Akrua.....	18
2.1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.....	22
2.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.....	22
2.2 Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Objek Penelitian.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24

3.3	Teknik Pengumpulan Data	25
3.4	Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	27
4.1.1	Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Perkim.....	27
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Perkim.....	27
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Perkim	28
4.2	Hasil Penelitian.....	30
4.2.1	Dasar Pencatatan Akuntansi pada Dinas Perkim	30
4.2.2	Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	31
4.2.3	Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perkim	35
4.3	Pembahasan	55
4.3.1	Laporan Realisasi Anggaran	55
4.3.2	Laporan Posisi Keuangan.....	56
4.3.3	Laporan Operasional	57
4.3.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	57
4.3.5	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		59
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Buku Kas Umum November 2017.....	37
Tabel IV.2	Laporan Pertanggungjawaban.....	38
Tabel IV.3	Jurnal Umum.....	39
Tabel IV.4	Buku Besar Kas	40
Tabel IV.5	Buku Besar R/K PPKD	41
Tabel IV.6	Buku Besar Biaya Gaji.....	41
Tabel IV.7	Buku Besar Tunjangan Keluarga	41
Tabel IV.8	Buku Besar Tunjangan Jabatan.....	42
Tabel IV.9	Buku Besar Tunjangan Beras.....	42
Tabel IV.10	Buku besar Persediaan ATK.....	42
Tabel IV.11	Neraca Saldo.....	43
Tabel IV.12	Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.....	47
Tabel IV.13	Laporan Realisasi Anggaran.....	48
Tabel IV.14	Laporan Posisi Keuangan.....	50
Tabel IV.15	Laporan Operasional.....	51
Tabel IV.16	Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
Tabel IV.17	Jurnal Penutup.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Siklus Penerimaan Kas.....	33
Gambar IV.2 Siklus Pengeluaran Kas.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan 2017 dan 2018

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran 2017 dan 2018

Lampiran 3 : Laporan Operasional 2017 dan 2018

Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas 2017 dan 2018

Lampiran 5 : Daftar Aset 2017 dan 2018

Lampiran 6 : Izin Operasional

Lampiran 7 : Foto Dokumentasi

Lampiran 8 : Struktur Organisasi

Lampiran 9 : Buku Harian

Lampiran 10 : Catatan Atas Laporan Keuangan 2017 dan 2018



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Salah satu perubahannya yaitu setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan organisasi milik pemerintah (termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas) menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi. Berbeda dengan organisasi non pemerintah yang berbentuk yayasan tetap menggunakan PSAK 45 dalam menyajikan laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan akan selalu terkait dengan standar pelaporannya, dalam pelaporan keuangan organisasi milik pemerintah sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diterapkan pada entitas yang berorientasi non pemerintah termasuk yayasan. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi pada masyarakat.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu : prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (8) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu : rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Tujuan akuntansi pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu akuntansi juga merupakan suatu siklus, artinya akuntansi terdiri dari tahapan-tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi pemerintah daerah adalah :

Jurnal transaksi: ini merupakan kegiatan peringkasan data. Transaksi yang tidak melibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang melibatkan pengeluaran kas dicatat pula dalam jurnal pengeluaran kas.

Posting ke buku besar: transaksi yang dicatat di dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang buku kas bendahara, yaitu : pemegang kas bendahara rutin, pemegang kas bendahara proyek, pemegang kas bendahara gaji dan bendahara penerima sesuai dengan rekening masing-masing transaksi.

Daftar saldo : adalah rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Adapun saldo rekening angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap rekening buku besar. Jurnal penyesuaian : agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenaan. Berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, maka pemerintah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya. Selain itu laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai evaluasi efisiensi, efektivitas, kegiatan operasional pemerintah, serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan

entitas akuntansi pada pemerintah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah kepada daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan potensi, kebutuhan serta karakteristik daerah itu sendiri.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Kepala yang merupakan unsur pendukung terhadap kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir secara teknis operasional langsung berada dibawah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam PERBUP Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Alasan pemilihan objek penelitian yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemekaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Selain itu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada dinas tersebut karena secara khusus Dinas PERKIM bertugas dalam membangun perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan apakah terdapat kendala ataupun perbedaan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Sebagai salah satu entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) yaitu dimulai dari semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum

(lampiran 9). Dimana dalam Buku Kas Umum tersebut terdapat kolom tanggal transaksi, uraian, penerimaan, pengeluaran dan kolom saldo untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi. Kemudian Dinas Perkim membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Fungsional. Selanjutnya mendokumentasikan transaksi yang terjadi dan menjurnalnya. Transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas (lampiran 9).

Selanjutnya proses akuntansi pada Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir adalah menyusun Buku Besar. Setelah buku besar, kemudian Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, selanjutnya membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (lampiran 3) yang formatnya terdiri dari pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer), belanja daerah, belanja operasi (yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa), belanja modal (terdiri atas belanja peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya), Surplus/Defisit, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), (2) Laporan Posisi Keuangan (terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas) (lampiran 1), (3) Laporan Operasional (terdiri atas Pendapatan; pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah; Beban, beban operasi, beban transfer; Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; Pos Luar Biasa) (lampiran 2), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (terdiri atas Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RKPPKD, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Ekuitas Akhir) (lampiran 4), (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 10). Selanjutnya proses akuntansi

yang dilakukan yaitu membuat Jurnal Penutup, kemudian membuat Neraca Saldo Setelah Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah. Laporan ini juga sebagai bukti komitmen mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Adapun masalah yang ditemukan pada laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah pada Laporan Posisi Keuangan saldo aset tetap gedung dan bangunan yang disajikan bukanlah nilai buku yang sebenarnya melainkan harga perolehan aset tetap tersebut. Nilai buku gedung dan bangunan tahun 2017 adalah Rp 339.228.786.809,52 (lampiran 5) tetapi yang disajikan yaitu harga perolehan sebesar Rp 392.182.922.984 (lampiran 1) dan tidak menghitung nilai penyusutan untuk aset tetap tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak menghitung nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 3), seperti pada tahun 2017 terdapat belanja persediaan perlengkapan dan alat tulis kantor sebesar Rp 156.773.000, yang terdiri atas belanja alat tulis kantor sebesar Rp 119.437.500, alat listrik dan elektronik sebesar Rp 4.000.000, perangko dan benda pos lainnya sebesar Rp 8.400.000, persediaan

peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp 24.935.500, sehingga nilai persediaan yang tersaji di Laporan Posisi Keuangan (lampiran 1) yaitu dengan nilai Rp 0.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak melakukan perhitungan rekonsiliasi bank pada setiap periode, sehingga tidak diketahui apakah terdapat perbedaan atau kekeliruan pencatatan antara akun kas pada Dinas dengan saldo kas yang dilaporkan bank. Selain itu Dinas Perkim juga tidak membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul : **Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut : Apakah Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Telah Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi pemerintah daerah secara khususnya bagaimana penerapan akuntansi pemerintah daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan penerapan akuntansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian keuangan pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab dengan rincian masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Merupakan landasan teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi pengertian akuntansi, pengertian akuntansi pemerintahan, karakteristik akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, komponen laporan keuangan pemerintah berbasis

akrual, lingkungan akuntansi pemerintahan, periode pelaporan dan ketepatan waktu, pengungkapan-pengungkapan lainnya, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, serta membahas tentang hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang dilakukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Ada banyak definisi tentang akuntansi. Definisi dimaksud bahkan dapat dilacak dari taksonomi akuntansi. Akuntansi bisa didefinisikan dari sisi akuntansi sebagai sebuah seni, ilmu (science), maupun perekayasaan (technology). Namun, tentu saja definisi akuntansi dapat dilihat dari perspektif lain. Salah satunya adalah dengan memahami akuntansi sebagai sebuah proses, yaitu :

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (*American Accounting Association*, 1966).

Menurut Ismail (2010:), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Sonny Sumarsono (2010:145) Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Meskipun lembaga pemerintahan pada umumnya berukuran besar, namun sebagaimana perusahaan, ia

tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintahan sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkan pula sebagai akuntansi mikro.

Perbedaan utama antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara atau daerah serta pelaporan realisasinya. Oleh sebab fungsi akuntansi yang demikian inilah akuntansi pemerintahan kadang kala disebut juga sebagai akuntansi anggaran. Perlu diingat juga, bukan hanya di dalam akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintahan juga terdapat unsur Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

2.1.3 Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2014), akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Penggunaan sistem pencatatan inilah yang membedakan antara pembukuan dengan akuntansi. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

a. Single Entry

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem *single entry*, transaksi ekonomi dilakukan dengan

pencatatan satu kali. Transaksi yang menyebabkan penambahan kas akan dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang menyebabkan pengurangan kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum (BKU).

b. Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, transaksi ekonomi pada dasarnya akan dilakukan pencatatan sebanyak dua kali, dalam artian bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, satu di sisi debit dan satu di sisi kredit. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal.

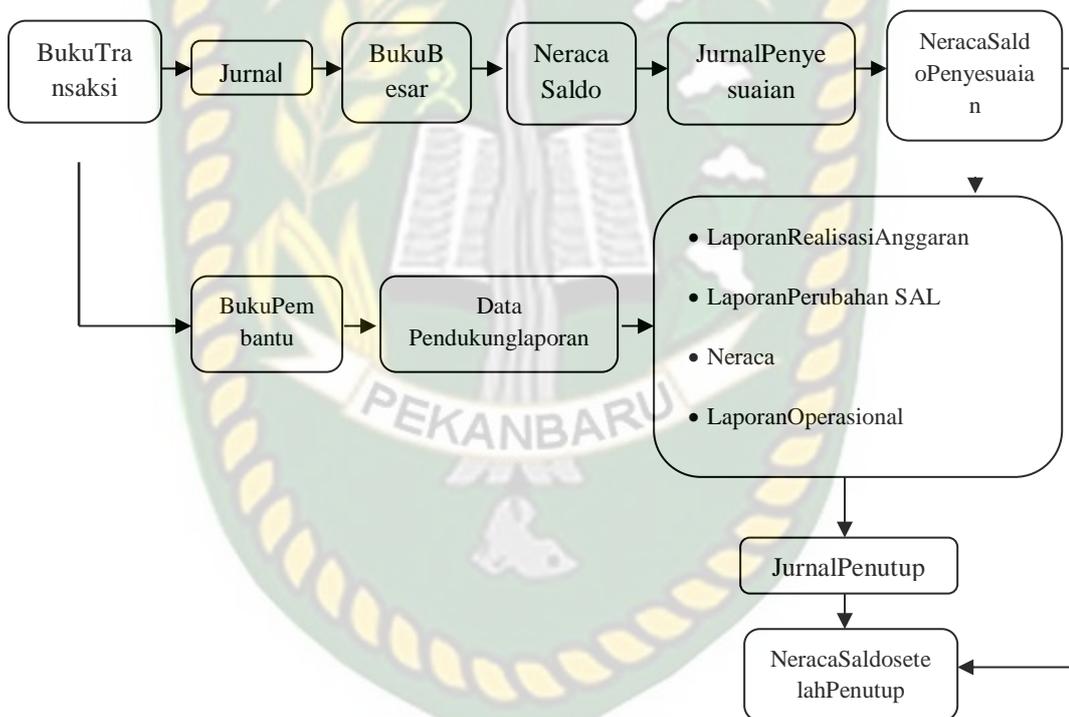
c. Triple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2.1.4 Siklus Akuntansi

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2014), akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan.

Tahapan siklus akuntansi dapat digambarkan seperti tampilan berikut:



2.1.5 Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

1. Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan ke perkiraan. Oleh karena itu, jurnal sering disebut *the books of original entry*. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat suatu perkiraan ke buku besar.

2. Posting ke Buku Besar

Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting ke buku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan istilah *the books of final entry*.

3. Neraca Saldo

Pada akhir periode akuntansi disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya dipersiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan

kan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis cukup akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Namun, keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat.

4. Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode yang lainnya.

Akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk menyusun neraca, sehingga perlu melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan tertentu.

5. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar perkiraan yang terkait. Apabila posting sudah selesai dilakukan, maka prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah disesuaikan.

6. Laporan Keuangan

Untuk menyusun laporan keuangan OPD, dapat menggunakan alat bantu yang biasa disebut dengan kertas kerja (*worksheet*). Kertas kerja digunakan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Jika menggunakan kertas kerja, langkah pengerjaannya dimulai setelah disusunnya neraca saldo.

7. Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (saldo temporer) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, yaitu pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, dan pembiayaan. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya perkiraan-perkiraan pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, dan pembiayaan merupakan subbagian dari perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas, sehingga pada akhir periode akuntansi/tahun anggaran, saldo-saldo tersebut akan ditransfer ke perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai estimasi perubahan SAL di neraca menjadi jumlah yang benar.

8. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Perkiraan-perkiraan yang ditutup adalah yang memiliki saldo nominal (saldo temporer) seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perkiraan ini tidak dibawa ke periode yang akan datang. Perkiraan-

perkiraan yang ada pada neraca saldo setelah penutupan adalah yang bersifat pemanen, yaitu perkiraan-perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas.

2.1.6 SAP Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).

2.1.7 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua 01 dalam paragraph 14 (dalam Abdul Hafiz Tanjung,2018:48) dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga keseluruhan komponen adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, silka/sikpa, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Menjelaskan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini memberikan informasi tentang penggunaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun lalu (SIKPA), sehingga tersaji lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional mengungkapkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang secara langsung tercakup dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO

Merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP BA 12 paragraf 8).

b. Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PSAP BA 12 paragraf 8).

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan (PSAP BA 12 paragraf 8).

d. Kegiatan Non Operasional

Merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutinperlu dikelompokkan tersendiri dalamkegiatan non operasional (PSAP BA 12 paragraf 45).

e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa

Merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

f. Pos Luar Biasa

Merupakan pendapatan luar biasa atau beban luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan (PSAP BA 12 paragraf 8).

g. Surplus/Defisit LO

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/deficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa (PSAP BA 12 paragraf 8).

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas memberikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi, operasi, transitoris, dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai naik atau turunnya ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus diungkapkan di dalam standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

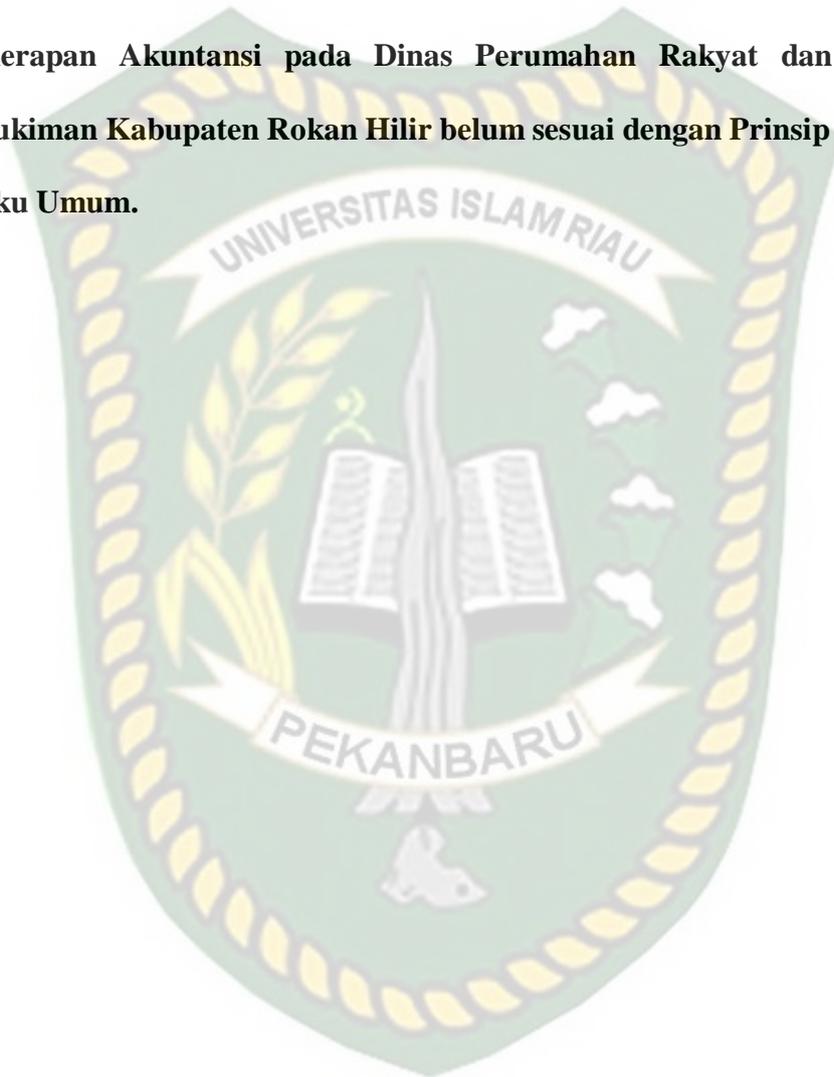
Akuntansi proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi komite akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan dalam pemecahan suatu masalah yang belum diatur dalam persyaratan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi pajak, analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

2.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 merupakan peraturan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar ini digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi dan rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : **Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang beralamat di Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir lebih tepatnya pada bagian keuangan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh sebagai pendukung penulisan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir berupa data mengenai proses penyusunan keuangan daerah, proses pengesahan keuangan daerah, proses pelaksanaan keuangan daerah, proses pengawasan keuangan daerah, proses pengesahan perhitungan keuangan daerah, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan yaitu mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk jadi seperti Sejarah singkat, visi dan misi, serta sruktur organisasi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupten Rokan Hilir, dan bukti pencatatan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa buku harian, bukti pencatatan kas masuk dan kas keluar, laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan posisi keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode yaitu :

1. Wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti kepala dinas, para bendaharawan beserta staf, kasubag tata usaha, serta kasi pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukiman.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengkopi file-file yang berhubungan dengan penulisan ini yang didapat langsung dari bendaharawan bersangkutan serta memotokopi dokumen-dokumen penting lainnya seperti buku harian dinas, pencatatan kas masuk dan kas keluar, serta laporan-laporan keuangan dinas yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas laporan Keuangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan dan kemudian disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan berhubungan

dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan yang disajikan dalam bentuk hasil penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam PERBUP Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2016 adalah terdiri atas : Tipologi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian :
 - a. Subbagian Ketatausahaan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Seksi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Registrasi
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat
 - c. Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
5. UPT (Unit Pelaksana Tugas)

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Adapun visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas Guna Mendukung Tercapainya Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan Pelayanan Perumahan Berkualitas Bagi Masyarakat
- b. Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman
- c. Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Mengedepankan Prinsip Good Governace dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai meliputi ;

- a. Meningkatnya Penyediaan Perumahan Layak Huni
- b. Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman
- d. Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Governance*)
- e. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Dari data yang diperoleh, maka dapat dianalisa tentang sistem akuntansi yang telah diterapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Dasar Pencatatan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai dasar/basis akuntansi. Jika dilihat dari segi fokus pengukuran dan waktu pengakuan ada dua jenis basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi ekonomi apabila terjadi perubahan kas, baik bertambah (kas masuk) atau berkurang (kas keluar). Apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi ekonomi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran pada basis akrual adalah seluruh sumber daya ekonomi, karenanya basis ini dapat menyediakan informasi laporan keuangan yang komprehensif.

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dasar/basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Akrual. Basis Akrual telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) untuk pelaporan finansial bagi seluruh entitas pemerintah termasuk pemerintah daerah.

4.2.2 Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Dinas

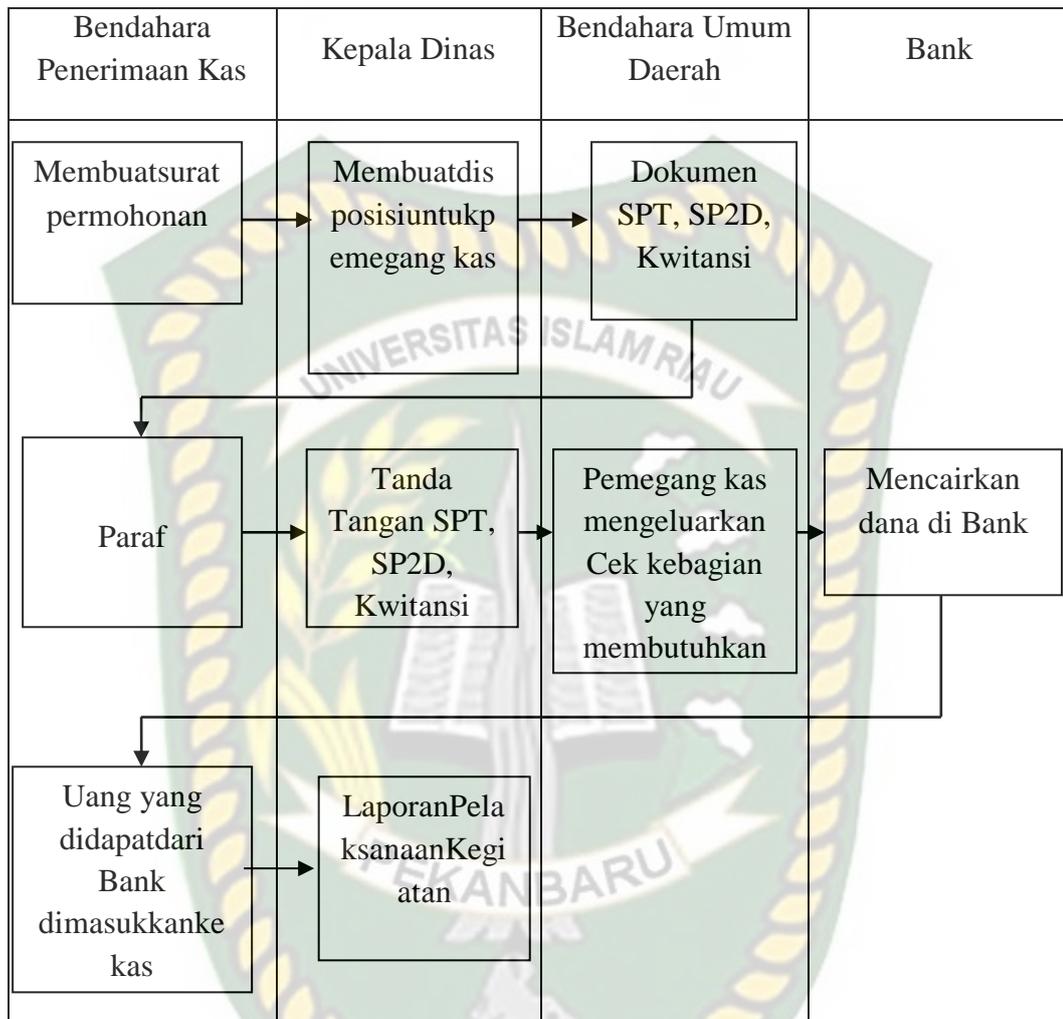
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

1. Sistem Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan dana, pada bagian Bendahara Pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas selaku pengguna anggaran. Kemudian Kepala Dinas membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah mengeluarkan dokumen SPT (Surat Pertanggungjawaban), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Kwitansi, perincian dan kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas. Setelah ditandatangani, Bendahara Umum Daerah menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek tersebut dicairkan ke Bank, uang yang didapat dimasukkan ke kas. Atas transaksi tersebut oleh Pembantu Bendahara Penerimaan disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan tidak membuat jurnalnya.

Berikut ini gambar siklus penerimaan kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir :

Gambar IV.1 Siklus Penerimaan Kas



Sumber : Data olahan

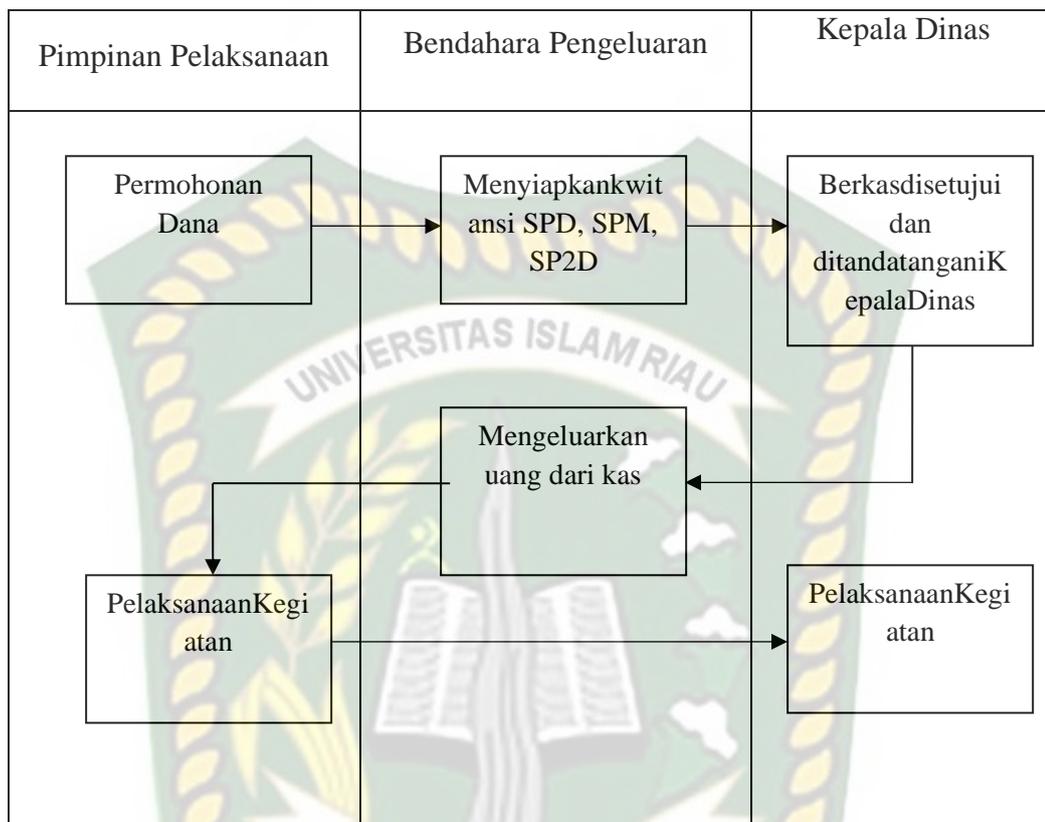
Dari siklus penerimaan kas di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan kas yang dianut oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir yaitu untuk mempermudah pengontrolan uang yang diterima dan juga memudahkan pencatatan atas penerimaan kas yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Sedangkan untuk proses pengeluaran kas pada Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu atasan Bendahara Pengeluaran memberikan persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu mengeluarkan uang dari kas kemudian dibukukan dan dibuat berkas atau dokumen yaitu SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM (Surat Permintaan Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebagai bukti atas pengeluaran. Berkas dan dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh atasan Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas.

Berikut ini gambar siklus Pengeluaran Kas pada Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir :

Gambar II2 Siklus Pengeluaran Kas



Sumber: Data olahan

Secara keseluruhan siklus pengeluaran kas yang dianut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu untuk memudahkan pengontrolan uang yang dikeluarkan dan juga memudahkan pencatatan atas pengeluaran kas yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.2.3 Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Pada dasarnya sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dan Standar Akuntansi Pemerintah, dimana dikatakan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum (lampiran 9), kemudian baru dilakukan jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir yaitu transaksi, buku kas umum, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Transaksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 02 November 2017 : Diterima SP2D Nomor 02534/SP2D/LS/X/2017 untuk pembayaran gaji serta tunjangan bulan Oktober 2017 sebesar Rp 236.916.840,00
- 04 November 2017 : Diterima SP2D Nomor 02537/SP2D/LS/X/2017 untuk tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 140.426.202,00
- 04 November 2017 : Diterima SP2D Nomor 02556/SP2D/LS/X/2017 untuk gaji honorer teknis kantor bulan Oktober 2017 sebesar Rp 52.325.000,00
- 04 November 2017 : Dibayar gaji pokok PNS kode rekening 5.1.1.01.001 sebesar Rp 207.106.840,00

04 November 2017 : Dibayar tunjangan keluarga kode rekening 5.1.1.01.002
sebesar Rp 12.560.000,00

04 November 2017 : Dibayar tunjangan jabatan kode rekening 5.1.1.01.003
sebesar Rp 17.250.000,00

04 November 2017 : Dibayar tunjangan beras kode rekening 5.1.1.01.006
sebesar Rp 8.780.760,00

Dari transaksi-transaksi di atas Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum seperti Tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel IV.1 Buku Kas Umum November 2017

Tanggal	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Diterima SP2D LS untuk pembayaran gaji	-	236.916.840	-	236.916.840
04 Nov 2017	Diterima SP2D LS untuk tambahan penghasilan PNS	-	50.426.202	-	287.343.042
04 Nov 2017	Diterima SP2D LS untuk gaji honorer teknis kantor	-	52.325.000	-	339.668.042
04 Nov 2017	Dibayarkan gaji pokok PNS	5.1.1.01.001	-	207.106.840	132.561.202
04 Nov 2017	Dibayarkan tunjangan keluarga	5.1.1.01.002	-	12.560.000	120.001.202
04 Nov 2017	Dibayarkan tunjangan jabatan	5.1.1.01.003	-	17.250.000	102.751.202
04 Nov 2017	Dibayarkan tunjangan beras	5.1.1.01.006	-	8.780.760	93.970.442

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah semua transaksi dicatat ke dalam Buku Kas Umum, proses selanjutnya adalah membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional).

Tabel IV.2 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) / November 2017

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ			Sisa Anggaran (Rp)
			s.d Bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s.d Bulan ini (Rp)	
51101001	Gaji Pokok PNS	2.222.423.669	654.951.753	258.132.236	913.083.989	1.309.348.680
51101002	Tunj. Keluar ga	191.456.062	90.509.638	18.866.369	109.376.007	82.080.055
51101003	Tunj. Jabatan	94.190.000	56.988.786	16.456.956	73.445.742	20.744.258
51101006	Tunj. Beras	145.781.460	52.570.280	9.045.000	61.615.280	84.166.180

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah membuat Buku Kas Umum dan merekap biaya pengeluaran ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional), Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir langsung membuat Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 2), Laporan Posisi Keuangan (lampiran 1), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 10).

Dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir di atas belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Adapun proses akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum serta Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Transaksi di atas dibuat jurnal sebagai berikut :

Sebenarnya Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir ini telah melakukan penjurnalan dengan sistem terkomputerisasi. Namun tidak melakukan *print out* sehingga proses penjurnalan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini tidak dapat diketahui. Berikut ini Tabel Jurnal Umum yang dibuat oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir :

Tabel IV.3 Jurnal Umum
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit
2 Nov 2017	Kas di Bendahara Pengeluaran R/K PPKD		Rp 236.916.840	Rp 236.916.840
4 Nov 2017	Kas di Bendahara Pengeluaran R/K PPKD		Rp 140.426.202	Rp 140.426.202
4 Nov 2017	Kas di Bendahara Pengeluaran R/K PPKD		Rp 52.325.000	Rp 52.325.000
4 Nov 2017	Beban gaji Kas di BP		Rp 207.106.840	Rp 207.106.840
4 Nov 2017	Beban tunjangan keluarga Kas di BP		Rp 12.560.000	Rp 12.560.000
4 Nov 2017	Beban tunjangan jabatan Kas di BP		Rp 17.250.000	Rp 17.250.000
4 Nov 2017	Beban tunjangan beras Kas di BP		Rp 8.780.760	Rp 8.780.760
4 Nov 2017	Beban gaji honorer Kas di BP		Rp 52.325.000	Rp 52.325.000
4 Nov 2017	Persediaan ATK Kas di BP		Rp 127.837.500	Rp 127.837.500

Sumber : Data Olahan

2. Posting ke Buku Besar

Setelah membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, proses selanjutnya adalah memposting ke Buku Besar. Sama halnya dengan penjurnalan, Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan print out dan hanya membuatnya sesuai dengan sistem yang terkomputerisasi sehingga tidak dapat diketahui. Berikut ini adalah buku besar dinas yang diolah penulis :

Tabel IV.4 Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
02 Nov 2017	Transfer dari BUD		236.916.840	-	236.916.840
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		140.426.202	-	377.343.042
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		52.325.000	-	429.668.042
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		-	207.106.840	222.561.202
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		-	12.560.000	210.001.202
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		-	17.250.000	192.751.202
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		-	8.780.760	183.970.442
04 Nov 2017	Transfer dari BUD		-	52.325.000	131.645.442
04 Nov 2017	Belanja ATK		-	127.837.500	3.807.942
Jumlah					3.807.942

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.5 Buku Besar R/K PPKD (Kasda)
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
02 Nov 2017	Transfer dari BUD			236.916.840	236.916.840
04 Nov 2017	Transfer dari BUD			140.426.202	377.343.042
04 Nov 2017	Transfer dari BUD			52.325.000	429.668.042
Jumlah					429.668.042

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.6 Buku Besar Biaya Gaji
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
04 Nov 2017	Belanja Gaji		207.106.840		207.106.840
04 Nov 2017	Belanja Gaji Honorer		52.325.000		259.431.840
Jumlah					259.431.840

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.7 Buku Besar Tunjangan Keluarga
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
04 Nov 2017	Tunjangan Keluarga		12.560.000		12.560.000
Jumlah			12.560.000		12.560.000

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.8 Buku Besar Tunjangan Jabatan
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
04 Nov 2017	Tunjangan Jabatan		17.250.000		17.250.000
Jumlah			17.250.000		17.250.000

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.9 Buku Besar Tunjangan Beras
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
04 Nov 2017	Tunjangan Beras		8.780.760		8.780.760
Jumlah			8.780.760		8.780.760

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.10 Buku Besar Persediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2017	Saldo Awal				
04 Nov 2017	Belanja ATK		127.837.500		127.837.500
Jumlah					127.837.500

Sumber : Data Olahan

3. Membuat Neraca Saldo

Setelah dilakukan pemostingan ke Buku Besar, tahap selanjutnya adalah membuat Neraca Saldo. Neraca saldo yang dibuat oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Berikut adalah neraca saldo Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir :

Tabel IV.4 Neraca Saldo Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
November 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.807.942	-
	Piutang Retribusi		-	-
	Persediaan ATK		127.837.500	-
	Tanah Kantor		-	-
	Peralatan dan Mesin		808.098.581	-
	Gedung dan bangunan		391.977.573.484	-
	Akumulasi Penyusutan Aset tetap			132.397.700.814
	R/K PPKD		-	429.668.042
	Beban Gaji		259.431.840	-
	Beban Tunjangan Keluarga		12.560.000	-
	Beban Tunjangan Jabatan		17.250.000	-
	Beban Tunjangan Beras		8.780.760	-
	Utang Barang dan Jasa		-	-
	Ekuitas dana- Diinvestasikan dalam asset tetap			260.387.971.251
	Pendapatan Retribusi		-	-
	Jumlah		393.215.340.107	393.215.340.107

Sumber : Data olahan

4. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran dalam satu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya.

Pada Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir di akhir periode tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir membuat jurnal penyesuaian agar nilai dari akun-akun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Posisi Keuangan menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Berikut ini salah satu transaksi yang seharusnya dilakukan penyesuaian adalah :

1) Penggunaan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selama masa penggunaan, aset tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan atau depresiasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung nilai penyusutan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Tetapi metode yang paling sering digunakan adalah garis lurus.

Yang termasuk Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset Tetap

disajikan sebesar harga perolehan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud dan diakui sebagai pengurang nilai dan diinvestasikan dalam aset tetap.

a. Gedung dan Bangunan

Contoh pada Laporan Posisi Keuangan tahun 2017 nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 392.182.922.984 Umur ekonomis gedung dan bangunan ditaksir 50 tahun dengan nilai sisa Rp 39.218.292.298 Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus.

Jurnal pada saat pembelian gedung dan bangunan sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Gedung dan Bangunan		Rp 392.182.922.984	
	Kas			Rp 392.182.922.984

Untuk menghitung nilai gedung dan bangunan yang disusutkan adalah :

$$\frac{Rp\ 392.182.922.984 - Rp\ 39.218.292.298}{50} = Rp\ 7.059.292.613,72$$

Maka nilai penyusutan pada gedung dan bangunan sebesar Rp 7.059.292.613,72 pertahun. Jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
31 Des	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		Rp 7.059.292.613,72	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			Rp 7.059.292.613,72

2) Perhitungan Nilai Akhir Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir pada Laporan Posisi Keuangan tidak menghitung nilai akhir persediaan untuk tahun 2017, sehingga nilai persediaan akhir yang tersaji sebesar Rp 0. Jurnal yang seharusnya dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

Jurnal pada saat pembelian persediaan :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
4 Nov	Persediaan Alat Tulis Kantor		Rp 127.837.500	
	Kas di Bendahara Pengeluaran			Rp 127.837.500

Karena Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan perhitungan nilai akhir persediaan sehingga tidak diketahui berapa nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun, maka nilai persediaan yang tersisa ditaksir sebesar Rp 10.000.000.

Jurnal penyesuaian pada akhir periode :

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
31 Des	Beban Persediaan ATK		Rp 117.837.500	
	Persediaan ATK			Rp 117.837.500

5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Tabel IV.12 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir
Desember 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp 3.807.942	-
	Piutang Retribusi		-	-
	Persediaan ATK		Rp 10.000.000	-
	Tanah Kantor		-	-
	Peralatan dan Mesin		808.098.581	-
	Gedung dan bangunan		391.977.573.484	-
	Akumulasi Penyusutan Aset tetap		-	139.537.803.285
	R/K PPKD		-	429.668.042
	Beban Gaji		Rp 259.431.840	-
	Beban Tunjangan Keluarga		Rp 12.560.000	-

	Beban Tunjangan Jabatan		Rp 17.250.000	-
	Beban Tunjangan Beras		Rp 8.780.760	-
	Utang Barang dan Jasa		-	-
	Ekuitas dana- Diinvestasikan dalam asset tetap		-	260.387.971.251
	Pendapatan Retribusi		-	-
	Beban Persediaan ATK		Rp 117.837.500	-
	Beban Penyusutan Peralatan		80.809.858	-
	Beban Penyusutan Gedung		7.059.292.613	-
	Jumlah		400.355.442.578	400.355.442.578

Sumber : Data Olahan

6. Laporan Keuangan

a) Laporan Realisasi Anggaran

Tabel IV. 13 Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2018 dan 2017					Dalam Rupiah
No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(%)	Realisasi 2017
(1)	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00		0.00
1.2	Pendapatan Transfer	0.00	0.00		0.00
1.2.2	Pendapatan Pemerintah Pusat – Lainnya	0.00	0.00		0.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00		0.00
1.2.4	Bantuan Keuangan	0.00	0.00		0.00
(2)	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	4.850.177.093	4.305.241.432		4.076.016.506
	Belanja barang dan jasa	33.478.810.074	27.999.145.870		20.553.975.994
	Belanja perlengkapan dan ATK kantor	322.692.300	322.692.300		
	Bunga	0.00	0.00		0.00
	Subsidi	0.00	0.00		0.00
	Hibah	0.00	0.00		0.00
	Jumlah Belanja Operasi	38.651.679.467	32.627.079.602		24.629.992.500

2.2	Belanja Modal				
	Belanja Tanah	0.00	0.00		0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	400.000.000	383.561.928		0.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.493.055.000	556.635.000		17.702.180.084
	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	20.772.368.940	18.650.332.580		30.462.396.966
	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00		0.00
	Jumlah Belanja Modal	22.665.423.940	19.590.529.508		48.164.577.050
2.3	Belanja Tak Terduga				
	Jumlah Belanja	61.317.103.407	52.217.609.110		72.794.569.550
(3)	Transfer				
3.1	Transfer/ Bagi Hasil	0.00	0.00		0.00
3.2	Transfer/ Bantuan Keuangan	0.00	0.00		0.00
	Jumlah Belanja dan Transfer	61.317.103.407	51.894.916.810		72.794.569.550
	Surplus/Defisit	(61.317.103.407)	(51.894.916.810)		(72.794.569.550)
(4)	Pembiayaan				
4.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00		0.00
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00		0.00
	Pembiayaan Neto				
	Surplus / Defisit	(61.317.103.407)	(51.894.916.810)		(72.794.569.550)

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

b) Laporan Posisi Keuangan

Tabel IV. 14 Laporan Posisi Keuangan
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Laporan Posisi Keuangan Periode Tahun 2018 dan 2017			
Dalam Rupiah			
No	Uraian	2018	2017
1	ASET		
1.1	Aset lancar		
	Kas	0.00	0.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
	Kas di BLUD	0.00	0.00
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
	Piutang	0.00	0.00
	Piutang pajak	0.00	0.00
	Piutang Retribusi	0.00	0.00
	Piutang lainnya	0.00	0.00
	Belanja dibayar dimuka	0.00	0.00
	Persediaan	1.551.400	0.00
	Jumlah Aset Lancar	1.551.400	0.00
1.2	Investasi Jangka Panjang		
1.2.1	Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
1.2.2	Investasi Permanen	0.00	0.00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
1.3	Aset Tetap		
	Tanah	0.00	0.00
	Peralatan dan Mesin	604.014.921	808.098.581
	Gedung dan bangunan	392.155.150.344	391.977.573.484
	Jalan,Irigasi dan Jaringan	145.508.392.452	151.992.909.874
	Aset Tetap Lainnya	232.306.000	232.306.000

	Konstruksi dalam Pengerjaan	61.188.639.744	59.103.893.000
	Akumulasi penyusutan	(21.177.876)	(14.118.584)
	Jumlah Aset Tetap	578.490.627.461	589.996.196.158
1.4	Dana Cadangan		
1.5	Aset lainnya	0.00	0.00
	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
	Aset Tak Berwujud	96.800.000	96.800.000
	Jumlah Aset	578.587.427.461	590.092.996.158
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
	Utang Belanja	1.135.849.000	5.385.505.205
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban	1.135.849.000	5.385.505.205
3	EKUITAS		
3.1	Ekuitas	577.451.578.461	584.707.490.953
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	578.587.427.461	590.092.996.158

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

c) Laporan Operasional

Tabel IV. 15 Laporan Operasional
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Laporan Operasional Periode Tahun 2018 dan 2017				
Dalam Rupiah				
No.	Uraian	2018	2017	%
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	
1.2	Pendapatan Transfer	0.00	0.00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya	0.00	0.00	

1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00	
2	BEBAN			
2.1	Beban Operasi			
	Beban pegawai	4.015.171.432	3.694.760.506	
	Beban persediaan	22.876.788.600	248.264.970	
	Beban barang dan jasa (selain persediaan)	4.377.724.370	2.826.053.391	
	Beban Bunga	0.00	0.00	
	Beban Subsidi	0.00	0.00	
	Beban Hibah	0.00	0.00	
	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	
	Beban penyusutan	31.759.819.168	30.834.101.986	
	Beban lain-lain	0.00	0.00	
	Jumlah Beban Operasi	63.029.503.571	37.603.180.853	
2.2	Beban Transfer	0.00	0.00	
	Jumlah Beban	63.029.503.571	37.603.180.853	
2.3	Surplus Non Operasional	0.00	0.00	
2.4	Defisit Non Operasional	0.00	0.00	
2.5	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	
2.6	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	
	Jumlah Pos dan Beban Luar Biasa	0.00	0.00	
	Surplus/Defisit - LO	63.029.503.571	37.603.180.853	

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel IV. 16 Laporan Perubahan Ekuitas
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Laporan Operasional Periode Tahun 2018 dan 2017			
Dalam Rupiah			
No.	Uraian	2018	2017
1	Ekuitas Awal	546.094.413.704	498.843.266.301
2	Surplus / Defisit Awal	(63.029.503.571)	(37.603.180.653)
3	RKPPKD	51.894.916.810	72.794.569.550
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	884.085.972	12.059.758.706
4.1	Koreksi nilai persediaan	0.00	0.00
4.2	Selisih Revaluasi asset tetap	3.100.000	21.916.000
4.3	Koreksi Nilai Utang	770.741.231	11.968.942.671
4.4	Koreksi Nilai akumulasi penyusutan	110.244.741	68.900.035
4.5	Pengembalian UP tahun 2017	0.00	0.00
5	Ekuitas Akhir	577.451.578.461	584.707.490.953

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

7. Jurnal Penutup

Pada dasarnya siklus akuntansi pemerintahan mengikuti siklus akuntansi pada umumnya. Jurnal penutup merupakan bagian dari siklus akuntansi yang belum disajikan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir. Berikut jurnal penutup yang harus diterapkan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel IV. 17 Jurnal Penutup
Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Ikhtisar surplus/defisit	Rp 37.600.784.953	
	Biaya		Rp 37.600.784.953

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Ikhtisar surplus/defisit	Rp 63.029.503.571	
	Ekuitas Dana		Rp 63.029.503.571

Sumber : Data Olahan

4.3 Pembahasan

Pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Dimana pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah telah membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

4.3.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah telah membuat Laporan Posisi keuangan sesuai dengan unsur-unsur seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 bahwa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) setidaknya menyajikan pos-pos berikut : (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka Panjang; (6) asset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka Panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Hanya saja masih terdapat beberapa kesalahan antara lain tidak menyajikan nilai penyusutan asset tetap Gedung dan bangunan, dimana Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir hanya menyajikan harga perolehan asset tetap tersebut. Seharusnya Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir menyajikan Nilai Buku asset tetap tersebut yaitu dengan cara mengurangkan Harga Perolehan dengan Akumulasi Penyusutan. Sehingga dapat diketahui nilai sebenarnya dari asset tetap Gedung dan bangunan tersebut.

Selain itu Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir tidak menghitung nilai akhir persediaan. Dimana pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat belanja persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 127.837.500.

4.3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional memberikan informasi yang mencakup seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang berisi tentang pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah telah membuat Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

4.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menjelaskan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

4.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Secara keseluruhan isi dari Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasannya. Namun pada intinya Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan informasi / penjelasan dari setiap laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bagi setiap pembaca ataupun penggunanya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat simpulan dan memberikan saran yang bermanfaat berikut ini.

5.1 Simpulan

1. Secara keseluruhan proses akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.
2. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari semua transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas yang dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (BKU).
3. Mendokumentasikan seluruh transaksi yang terjadi lalu menjurnalnya. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja Dinas tidak melakukan *print out* untuk proses penjurnalan dan hanya membuatnya sesuai dengan sistem yang terkomputerisasi.
4. Proses akuntansi berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir adalah membuat Buku Besar untuk mencatat rincian rekening tertentu, namun tidak membuat Buku Besar Pembantu. Tahap selanjutnya yaitu membuat Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.

5. Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya menerapkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, hal ini sesuai dengan hipotesis awal sebelumnya yang dibuat oleh penulis. Untuk itu Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir sangat perlu melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang penulis sarankan.

5.2 Saran

1. Dinas Perkim kabupaten Rokan Hilir perlu membuat buku besar pembantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Dan sebaiknya Dinas melakukan *print out* untuk setiap penjumlahan yang dilakukan terutama jurnal umum sehingga Dinas memiliki pencatatan sendiri sebagai arsip sebelum diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengelola Akuntansi Pemerintahan harus berpedoman pada Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang SAP Berbasis AkruaI dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar secara keseluruhan proses akuntansi dapat sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi berikutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Agus, S. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwin, R. P. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Fitri, R. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Hidayah, N. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Imam, A. S. (2010). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Mirwan, D. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syam, A. H. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syam, A. H. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, A. H. (2018). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta.
- Yusniati. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Peraturan :

Pemerintah Indonesia. 2005, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2010, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2013, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 2016, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir*. Bagansiapiapi.

